

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagi Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan dewasa ini menjadi sangat penting karena menurut Sumodiningrat (1997) Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekedar 10-20 % Penduduk hidup di dalam kemiskinan Absolut (*Extreme poverty*) akan tetapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga perlima atau 60 % penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan karena itu mengacu pada paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*People-centered, participatory, empowering, end susnable*" (Chambers, 1995), maka Upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan (Theresia, dkk.2015).

Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini di buktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antara daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (Kausaulatias Melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena investasinya juga pendapatan rendah. Tingkat investasi per kapita yang rendah di sebabkan oleh permintaan domestik per kapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai hubungan sebab dan akibat (Teori Nurkse) telah di buktikan untuk contoh kasus lingkaran kemiskinan kemiskinan di Indonesia (Apriyanti 2011).

Kebijakan pembangunan ekonomi yang di ambil oleh pemerintah dapat di katakan kurang berhasil dalam penanggulangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial ini. Kebijakan pembangunan selama ini di laksanakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mengesampingkan aspek pemerataan. Menurut kebijakan tersebut dengan pertumbuhan ekonomi tinggi berarti dapat mengurangi kesenjangan sosial dan juga terjadi penyerapan tenaga kerja yang besar sehingga angka pengangguran menurun dapat berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga di jadikan indikator bahwa kesejahteraan sosial masyarakat mengalami peningkatan. Tetapi dalam masyarakat yang menjadi justru semakin tinggi (Rahayu, 2009).

Peran BKM adalah mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar pro aktif dalam proses pengambilan Keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana prasarana dasar lingkungan bagi masyarakat miskin.

Adapun Tugas Fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sebagai berikut

- 1) Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat.
- 2) Pusat Pengembangan aturan
- 3) Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan
- 4) Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, utamanya penanggulangan kemiskinan
- 5) Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat

- 6) Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat desa
- 7) Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah ataupun pihak ketiga (chanelling).

Tugas Pokok Badan Keswadayaan Masyarakat BKM sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, termasuk penggunaan dana BLM program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
2. Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan misi, visi, rencana strategis dan rencana program penanggulangan kemiskinan (pronangkis).
3. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BKM, termasuk penggunaan dana program pemberdayaan masyarakat di penanggulan kemiskinan di wilayahnya.
4. Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalian ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi.
5. Memperivikasi penilaian yang telah di lakukan oleh unit-unit pelaksanaan dan memutuskan proposal mana yang di prioritaskan di danai oleh dana program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya atau dana-dana lain yang dihimpun oleh BKM, atas dasar kreteria dan prosedur yang di sepakati dan di tetapkan bersama.

6. Memonitor, mengawasi dan memberikan masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunannya di pedesaan.
7. Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratis.
8. Membangun transparansi kepada masyarakat khususnya dan pihak luar umumnya, melalui berbagai media, seperti pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/ triwulanan serta rapat-rapat terbuka dan lainnya.
9. Membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui aditor external/independen serta menyebar luaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat.
10. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dengan di hadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggung jawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil kepada masyarakat.
11. Membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan , kegiatan, dan keuangan yang di bawah kendali BKM.
12. Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah kelurahan setempat, untuk dapat di komunikasikan, di koordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
13. Mengawal penerapan nilai-nilai dasar dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan.

14. Menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan atau pembangunan pedesaan dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal).
15. Merencanakan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas lingkungan serta pemukiman yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat.
16. Memfasilitasi net working (jejaring) kerjasama dengan berbagai potensi sumber daya yang ada sumber-sumber luar masyarakat setempat.

Tujuan penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran di yang telah di lakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat Miskin di kelurahan pungkur , kecamatan Lengkong Besar kota Bandung Mengetahui, Mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pemberdayaan Masyarakat yang di lakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Pungkur , Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti membuat rumusan masalah bagaimana peran Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kelurahan pungkur kecamatan regol .

1.2.Rumusan masalah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam memberdayakan masyarakat Miskin di Kelurahan Pungkur Kecamatan regol kota Bandung. Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tetapkan maka peneliti memfokuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan Pungkur kecamatan Regol.
2. Bagaimana peran Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kelurahan pungkur kecamatan Regol.
3. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kelurahan Pungkur Kecamatan Regol.

1.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.1.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui:

1. Bagaimana Program Badan Keswadayaan Masyarakat BKM dalam Pemberdayaan masyarakat miskin
2. Bagaimana Pelaksanaan Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan masyarakat miskin
3. Apa saja Faktor Penhambat dan pendukung peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kelurahan Pungkur kecamatan regol.

1.1.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi kegunaan secara teoretis. Secara teoretis,kegunaan yang di ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

1. Secara keilmuan (teoritis) hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang kajian Peran badan keswadayaan masyarakat masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
2. Secara akademik, penelitian ini dapat menambah khasah keilmuan pada ilmu kesejahteraan sosial khususnya yang membahas tentang pelaksanaan Peran badan keswadayaan Masyarakat.

3. Dari hasil penelitian selanjut sebagai ajuan/referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pemberdayaan Masyarakat miskin .

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Membuat kebijakan dalam melaksanakan program-program Penanggulangan Kemiskinan dalam peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan masyarakat Miskin.
2. Bagi Masyarakat adalah Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah Pemahaman penting tentang pemberdayaan Masyarakat miskin dalam meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
3. Bagi Peneliti, untuk Menambah Pengetahuan dan wawasan sehingga dapat di lakukan penelitian Lanjutan dan dapat di jadikan pengalaman sebagai colon pekerja sosial yang Profesional.